



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Alamat : Gedung I BPPT Lantai 9 - 14, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon : (021) 3927422 Faksimile : (021) 3927527
Situs <http://www.bsn.go.id> email : bsn@bsn.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Arlina Prabowo
Jabatan : Kepala Subbagian Analisa dan Bantuan Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wahyu Wibawa
Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Wahyu Wibawa

Jakarta, 28 Februari 2017

Pihak Pertama

Ika Arlina Prabowo



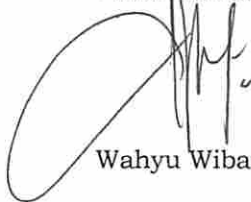
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Alamat : Gedung I BPPT Lantai 9 - 14, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon : (021) 3927422 Faksimile : (021) 3927527
Situs <http://www.bsn.go.id> email : bsn@bsn.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SUB BAGIAN ANALISA DAN BANTUAN HUKUM BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
1	Tersedianya peraturan perundangan-undangan di bidang SPK	1	Jumlah kajian peraturan perundang-undangan di bidang SPK yang diselesaikan	3	Dokumen
		2	Prosentase kajian Hukum Internasional di bidang SPK terselesaikan dari yang diusulkan	90	%
		3	Prosentase kajian Hukum Penataan Peraturan Perundang-undangan di BSN	100	%
2.	Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum	4	Prosentase pemberian bantuan hukum	65	%
		5	Jumlah penyuluhan hukum di bidang SPK	7	Kegiatan
		6	Prosentase analisa hukum terhadap rancangan kerjasama BSN dengan subyek hukum nasional	90	%
		7	Prosentase analisa hukum terhadap rancangan kerjasama BSN dengan subyek hukum internasional	90	%

Pihak Kedua



Wahyu Wibawa

Jakarta, 28 Februari 2017

Pihak Pertama



Ika Arlina Prabowo